

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM UPAH
PROFESI WANITA PENYUSUN BOLA *BILLIARD*
(Studi di Hendri Billiard Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang
Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh

CITRA FEBY PUTRA ULFI

NPM: 1621030611

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM UPAH
PROFESI WANITA PENYUSUN BOLA *BILLIARD*
(Studi di Hendri Billiard Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang
Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh

CITRA FEBY PUTRA ULFI

NPM: 1621030611

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I: Dr. H. Khoirul Abror, M.H

Pembimbing II: Muslim, S.H.I., M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

ABSTRAK

Secara umum upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu dibayarkan menurut perjanjian, namun ada pekerjaan yang disebut *Marki Billiard* yaitu wanita yang menyusun bola pada permainan *Billiard* khususnya berada di Hendri *Billiard* Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, *Billiard* dengan sistem koin adalah para pemain yang bermain dalam 1 (satu) set permainan menggunakan hitungan perkoin. Jadi, jika para pemain ingin bermain *Billiard* dengan sistem ini para pemain harus membeli koin. Harga perkoinnya adalah Rp 2000, jika di permainan *Billiard* dengan sistem koin tidak dibatasi dengan waktu, berbeda halnya dengan permainan *Billiard* dengan sistem jam yang dibatasi oleh waktu. Tergantung dari para pemain mengambil paket perjam. Harga paket perjam adalah Rp 25.000. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana sistem upah profesi wanita penyusun bola *Billiard* di Hendri *Billiard* Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem upah profesi wanita penyusun bola *Billiard* di Hendri *Billiard* Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui sistem pengupahan wanita penyusun bola *Billiard* di Hendri *Billiard* Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem upah profesi wanita penyusun bola *Billiard* di Hendri *Billiard* Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Manfaatnya adalah diharapkan dapat memberikan informasi dan pandangan hukum Islam mengenai praktek upah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif* yaitu memaparkan, dan menggambarkan tentang sistem upah, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan studi perpustakaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisis hukum Islam tentang Upah Profesi Wanita Penyusun Bola *Billiard* (Studi di Hendri *Billiard* Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan) dapat ditarik kesimpulan bahwa wanita penyusun bola *Billiard* ini dirugikan apabila para pemain menggunakan sistem perkoin maka wanita penyusun bola *Billiard* ini dirugikan karna sering terjadi koin tidak keluar atau macet dalam meja *Billiard*, akibat koin tersebut macet maka wanita penyusun bola *Billiard* tersebut merasa dirugikan karena dalam hitungan koin yang macet akan mengurangi upah yang akan didapatkan wanita penyusun bola *Billiard* tersebut dan menurut pandangan hukum Islam tidak sah karena upah yang diberikan kepada wanita penyusun bola *Billiard* belum sesuai dengan perjanjian akad di awal. Seiring berjalannya waktu setelah para wanita penyusun bola *Billiard* bekerja, mereka baru mengetahui jika ada koin yang macet tidak dibayarkan dan merugikan para wanita penyusun bola *Billiard*. Hal tersebut berarti belum sesuai dengan hukum Islam.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Citra Feby Putra Ulfi

Npm : 1621030611

Jurusan/Prodi Studi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Profesi Wanita Penyusun Bola *Billiard* (Studi di Hendri Billiard Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan) adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali sebagian yang telah dirujuk dalam perpustakaan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 08 September 2020

Penulis

Citra Feby Putra Ulfi
Npm: 1621030611



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

A Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul : “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah
Profesi Wanita Penyusun Bola Billiard (Studi di
Hendri Billiard Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung
Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”.**

Nama : Citra Feby Putra Ulfi

NPM : 1621030611

Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari’ah)

Fakultas : Syari’ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasah
Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

**Dr. H. Khoirul Abror, M.H
NIP. 195704031987031003**

Pembimbing II

Muslim, S.H.I., M.H.I

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu’amalah**

**Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Profesi Wanita Penyusun Bola Billiard (Studi di Hendri Billiard Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”**. Disusun oleh Nama: CITRA FEBY PUTRA ULFI Npm: 1621030611, Program Studi: Muamala, telah diujikan dalam siding munaqasah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. (.....)

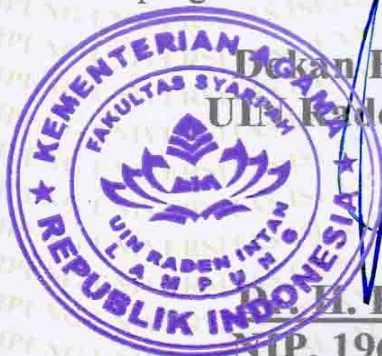
Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I. (.....)

Penguji Utama : Drs. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M. (.....)

Penguji Pendamping I: Dr. H. Khoirul Abror, M.H. (.....)

Penguji Pendamping II: Muslim, S.H.I., M.H.I. (.....)

**Dekan Fakultas Syari’ah
UIN Raden Intan Lampung**



H. Khoiruddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ^{٢٣٣}

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah(2): 233).



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah menurunkan syariat Islam sebagai jalan atau tuntunan hamba-NYA agar hidup bahagia lahir dan batin dunia maupun akhirat. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW dalam menjalankan syariat Islam sebagai pedoman hidup di dunia maupun akhirat.

Berkat limpahan dan rahmat-Nya penyusun mampu menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Profesi Wanita Penyusun Bola Billiard Berdasarkan Pada Koin (Studi di Hendri Billiard Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan).”**

Dalam penulisan skripsi ini, tentu saja tidak terlepas dari bantuan dari beberapa pihak yang telah memberikan masukan dan dorongan baik secara spiritual maupun materil. Oleh karena itu saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

4. Bapak Dr. H. Khoirul Abror, M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muslim, S.H.I., M.H.I. selaku Dosen Pembimbing II.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Teman-teman seperjuangan Muamalah angkatan 2016, khususnya sahabat dan keluarga besar Muamalah H angkatan 2016 yang telah membantu dan menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidikku dari awal masuk hingga saya lulus yang telah memberikan pengetahuan ilmu hukum dan ilmu agama.



Bandar Lampung, Selasa 28 Juli 2020

Hormat Penulis

CITRA FEBY PUTRA ULFI
NPM: 1621030611

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian	6
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Penelitian.....	7
G. Manfaat Penelitian.....	7
H. Metode Penelitian.....	8

BAB II : KAJIAN TEORI

A. Akad.....	14
1. Pengertian Akad	14
2. Rukun dan Syarat Akad	16
3. Macam-Macam Akad	19
4. Berakhirnya Akad	21
B. Upah	21
1. Pengertian Upah	21
2. Dasar Hukum	25
3. Rukun dan Syarat	31
4. Macam-Macam Upah.....	38
5. Sistem Pengupahan dalam Islam.....	39
6. Batalnya Akad	40
7. Berakhirnya Akad Upah.....	41
C. Perjanjian.....	43
1. Pengertian Perjanjian	43
2. Dasar Hukum Perjanjian	44
3. Rukun dan Syarat Perjanjian	45
4. Asas-Asas Perjanjian.....	50
5. Berakhirnya Perjanjian	53
D. Tinjauan Pustaka	54

Bab III : LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Hendri <i>Billiard</i> Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan	58
1. Sejarah Berdirinya Hendri <i>Billiard</i> Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan	58
2. Visi dan Misi	59
3. Struktur Kepengurusan Pegawai Hendri <i>Billiard</i> Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan ...	60
B. Gambaran Umum Tentang <i>Billiard</i>	60
1. Macam-macam Jenis Permainan Bola <i>Billiard</i>	61
2. Teknik Dasar Pukulan <i>Billiard</i>	62
C. Pelaksanaan Upah Wanita Penyusun Bola <i>Billiard</i> di Hendri <i>Billiard</i> Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan	64

Bab IV: ANALISA DATA

A. Sistem Upah Profesi Wanita Penyusun Bola <i>Billiard</i>	73
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Profesi Wanita Penyusun Bola <i>Billiard</i>	74

Bab V: PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Rekomendasi	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Profesi Wanita Penyusun Bola *Billiard* (Studi di Hendri *Billiard* Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”** dan memudahkan dalam memahami skripsi, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan di buatnya skripsi ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul. Di samping itu langkah ini merupakan pokok penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas untuk itu akan diuraikan pengertian dan istilah-istilah judul tersebut yaitu:

Tinjauan adalah hasil meninjau pandangan pendapat (sesudah, menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹

Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung pada sumber Al-Qur'an dan As-Sunnah baik ketetapan langsung maupun tidak langsung.²

Sistem adalah sekelompok bagian-bagian alat dan sebagainya yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu.³

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.1060.

²Buvana Shalahin, *Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), h.11

Upah menurut bahasa yaitu imbalan atau pengganti. Menurut istilah upah yaitu mengambil manfaat tenaga orang lain dengan memberi imbalan menurut syarat-syarat tertentu.⁴

Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya).⁵

Wanita adalah kaum perempuan yang lebih dewasa.⁶

Penyusun adalah menumpuk yang teratur tindih-menindih dengan rapi.⁷

Bola adalah bola bulat yang dibuat dari karet untuk bermain-main.⁸

Billiard adalah permainan yang menggunakan bola (kecil) dari gading dan sebagainya dan tongkat panjang sebagai pendorong bola putih agar mengenai bola sasaran yang bernomor sehingga masuk ke lubang yang dituju di atas meja persegi panjang yang berlapis kain laken (bola sodok).⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul di atas yaitu sebuah penelitian yang menganalisis secara mendalam tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah

³*Ibid.*, h. 903.

⁴Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung Jl Letkol H. Endro Suratmin Sukarame:2015), h. 141.

⁵Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan" (On-line), tersedia di: kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Profesi (2016).

⁶Dessy Anwar dan Amelia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: I, 2002) h. 622.

⁷*Ibid.*, h. 501.

⁸*Ibid.*, h. 88.

⁹Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan" (On-line), tersedia di: kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Bilyar (2016).

Profesi Wanita Penyusun Bola *Billiard* di Hendri *Billiard* Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan dalam memilih dan menentukan judul tersebut adalah :

1. Alasan Objektif

Adanya kejanggalan terhadap sistem upah profesi wanita penyusun bola *Billiard*, yaitu penghasilannya tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh pemilik *Billiard*.

2. Alasan Subjektif

- a. Sejauh yang penulis ketahui, permasalahan ini belum pernah dibahas dalam judul skripsi, khususnya di Fakultas Syari'ah.
- b. Buku-buku referensi mengenai objek ini mudah di dapat, di samping pembahasan mengenai judul ini menarik untuk di bahas dan diteliti.

C. Latar Belakang Masalah

Secara umum agama Islam meliputi dua ajaran pokok, yaitu *akidah* dan *syari'ah*. *Akidah* mengatur tentang masalah-masalah apa yang harus diyakini manusia meliputi iman kepada Allah, Malaikat-Malaikat-Nya, Rosul-Rosul-Nya, Kitab-Kitab-Nya, Hari Kiamat, dan percaya pada *Qadha* dan *Qadar*. *Syari'ah* merupakan aturan yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia, meliputi *ibadah* dan *muamalah*. *Ibadah* merupakan hukum-hukum yang mengatur

hubungan manusia dengan Allah, sedangkan *muamalah* merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia.¹⁰ Hukum Islam (*syari'ah*) mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi persoalan dunia Islam masa kini. Prinsip umum hukum Islam berlaku di masa lampau, masa kini, dan akan tetap berlaku di masa depan.¹¹

Menurut Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'i*, berpendapat bahwa *ijarah* adalah upah mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan Kamaludin A.Marzuki sebagai penerjemah *Fiqh Sunnah* karya Sayid Sabiq menjelaskan makna *ijarah* dengan sewa menyewa.

Al-Ijarah berasal dari kata *Al-Ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *Al- 'iwadh* yang arti dalam bahasa indonesianya ialah ganti dan upah. Sedangkan menurut istilah, *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan di sengaja dari suatu zat yang di sewa dengan imbalan.¹² Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Qasash [28] : 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيَنَّكَ أُسْتَجْرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ أُسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ



¹⁰Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 2.

¹¹Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 27.

¹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 114.

Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S. Al-Qasas [28] : 26)¹³

Penggalan ayat di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya upah mengupah adalah suatu tanda terima kasih kepada seseorang yang telah melakukan pekerjaan, namun ada pekerjaan yang di sebut *Marki Billiard* yaitu wanita yang menyusun bola pada permainan *Billiard* khususnya berada di *Hendri Billiard Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan*, seorang wanita penyusun bola *Billiard* cenderung dirugikan dengan ketentuan waktu yang cukup lama dalam bekerja dengan upah yang tidak sesuai dengan pekerjaannya. Dalam bermain *Billiard* ada dua sistem yang digunakan yaitu hitungan perjam dan perkoin. Wanita penyusun bola *Billiard* ini dirugikan dengan para pemain yang belum mahir apabila para pemain memakai sistem hitungan perjam dan apabila para pemain menggunakan sistem perkoin maka wanita penyusun bola *Billiard* ini dirugikan karna sering terjadi koin tidak keluar atau macet dalam meja *Billiard*, akibat koin tersebut macet maka wanita penyusun bola *Billiard* tersebut merasa dirugikan karena dalam hitungan koin yang macet akan mengurangi upah yang akan didapatkan wanita penyusun bola *Billiard* tersebut.

Permasalahan yang telah dipaparkan di atas memotivasi penulis untuk membahas lebih jauh dengan dilakukannya penelitian berupa karya

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*...., h. 613.

ilmiah dan menuangkannya dalam judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Profesi Wanita Penyusun Bola *Billiard* Studi di Hendri *Billiard* Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

D. Fokus Penelitian

Dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat *holistik* (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.¹⁴ Fokus penelitian ini penulis menyoroti aspek tentang upah mengupah terhadap pekerjaan wanita penyusun bola *Billiard*.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat menarik permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana Sistem Upah Profesi Wanita Penyusun Bola *Billiard* di Hendri *Billiard* Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Profesi Wanita Penyusun Bola *Billiard* di Hendri *Billiard* Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan?

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 207.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Sistem Pengupahan Wanita Penyusun Bola *Billiard* di Hendri *Billiard* Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.
2. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Profesi Wanita Penyusun Bola *Billiard* di Hendri *Billiard* Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Profesi Wanita Penyusun Bola *Billiard* di Hendri *Billiard* Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

2. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan manfaat bagi masyarakat khususnya di Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan mengenai upah wanita penyusun bola *Billiard* di Hendri *Billiard* Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia. Sistematis berarti proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.¹⁵

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field research* yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada di lapangan dengan kejadian yang sebenarnya.¹⁶

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan

¹⁵ *Ibid.*, h.2.

¹⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach* (Bandung: Social Mandar Maju, 1996), h. 33.

menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.¹⁷

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (*observasi*) terhadap gejala yang ada di lokasi kasus penelitian, wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini melalui kuesioner atau pertanyaan yang sudah disiapkan.¹⁸ Data primer ini diperoleh penulis dari wanita penyusun bola *Billiard* yang bekerja di *Hendri Billiard* Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi perpustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil penelitian berwujud laporan dan lain sebagainya.¹⁹

c. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi

¹⁷Mardalis, *metode penelitian* (Jakarta: sinar grafika offset, 2004), h.26.

¹⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 68.

¹⁹Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 30.

atau studi sensus²⁰. Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 1 pemilik usaha *Billiard*, 6 wanita penyusun bola *Billiard* dan 8 pemain *Billiard* di Hendri *Billiard* Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan penjelasan di atas penelitian ini diambil populasi yaitu:

- a) Pemilik.
- b) Wanita penyusun bola *Billiard*.
- c) Pemain bola *Billiard*.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian dengan pengamatan.²¹ Observasi dalam penelitian ini adalah dengan mengamati wanita penyusun bola *Billiar*.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnose dan *treatment* seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 102

²¹Sedarmayanti Dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2001), h.74.

penelitian dan lain-lain.²² Penulis melakukan wawancara kepada wanita penyusun bola *Billiard* di Hendri *Billiard* Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dalam masalah variabel, yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan buku langger.²³ Metode ini merupakan upaya penulis dalam menganalisis masalah yang diteliti mengenai upah wanita penyusun bola *Billiard*.

4. **Metode Pengolahan Data**

a. *Editing*

Editing adalah membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban-jawaban responden sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka lengkap dan sempurnanya jawaban responden.²⁴

²²Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 95.

²³Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.

²⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.

b. Sistemazing

Sistemazing adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁵

c. Koding

Koding adalah pemberian kode atau tanda tertentu pada jawaban-jawaban responden setelah diedit. Pemberian kode dilakukan manakala kerja editing telah selesai dilakukan. Tujuan pemberian kode-kode tiada lain adalah untuk memudahkan pekerjaan analisis data yang akan dilakukan.²⁶

5. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.²⁷ Analisis data adalah sebagai tindak lanjut pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya fikir secara optimal.²⁸

Metode analisis kualitatif ini dilakukan sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dan orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti. Baru kemudian, data dan informasi yang diperoleh serta telah melalui proses penyaringan dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui keterkaitan dengan permasalahan pokok dalam studi ini, kemudian

²⁵ Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), h. 107.

²⁶ *Ibid.*, h. 73.

²⁷ Lexy J Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 3.

²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek....*, h. 77

dianalisa secara seksama sehingga dapat ditafsirkan dan ditarik kesimpulan secara objektif.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian akad

Akad berasal dari bahasa Arab yang artinya perikatan, perjanjian, dan pemufakatan.¹ Pertalian *ijab qabul* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak *syari'at* yang berpengaruh pada objek perikatan.

Secara etimologi, akad mempunyai beberapa arti, antara lain:²

- a. Mengikat (*ar-Aabthu*), yaitu: mengumpulkam dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan (*Aqdatun*), yaitu sambungan yang menjai memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji (*al-ahdu*), sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Imran [3] :76)³

Istilah *ahdu* dalam Al-Qur'an mengacu pada pertanyaan seorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan

¹Nasron Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada Pratama, 2007), h. 97.

²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 101.

³Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahannya* (Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994), h. 88.

pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap janji yang dibuat orang tersebut.⁴

Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.⁵

Dalam istilah *fiqh*, secara umum akad berarti suatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh dalam sesuatu.⁶ Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut akad dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).

Beberapa tafsiran dari kitab suci al-qur'an menyatakan bahwa kata '*aqud* tersebut dalam versi arti kesepakatan ataupun akad lain-lainnya menyebutkan kata tersebut berarti kewajiban-kewajiban dari Tuhan terhadap manusia.

⁴Sohari Ruf'ah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Raja Grafindo Persada, 1979), h. 42.

⁵Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 26.

⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 68.

Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar akad adalah pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.⁷ Sedangkan menurut Mustafa Za-Zarqa', dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan itulah yang disebut *ijab* dan *qabul*. Pelaku (pihak) pertama disebut *mu'jib* dan pelaku kedua disebut *qaabil*.⁸

2. Rukun dan syarat akad

a. Rukun akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing pihak maka timbul bagi kedua belah pihak yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Aqid* ialah orang yang berakal, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang dari beberapa orang, seorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak. Ulama *fiqh*

68. ⁷Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.

⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam....*, h. 102-103.

memberikan persyaratan atau kriteria yang harus terpenuhi oleh *aqid*,⁹ antara lain:

- a) *Ahliyah*, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki *ahliyah* jika telah *baligh* atau *mumayyiz* dan berakal. Berakal disini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan-ucapan orang normal. Sedangkan *mumayyiz* di sini artinya mampu membedakan yang baik dan yang buruk, antara yang berbahaya dan yang tidak berbahaya, dan antara yang menguntungkan dan merugikan.
- b) *Wilayah*, wilayah dapat diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan *legalitas syar'i* untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut memang pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak atau otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang penting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.
- c) *Mau'quh 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan.

⁹*Ibid.*, h. 68.

- d) *Maudhu' al'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
- e) *Sighat al'aqd* ialah *ijab* dan *qabul*, *ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* perkataan yang keluar dari pihak yang berkada pula, yang diucapkan setelah *ijab*.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam *sighat al-aqd*¹⁰ ialah:

- a) *sighat al-aqd* harus jelas pengertiannya, kata-kata dalam *ijab qabul* harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
- b) harus sesuai antara *ijab* dan *qabul*. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda *lafadz*.
- c) Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* harus saling *ridha*.

b. Syarat Akad

Setiap pembentuk akad syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat umum yang harus terepenuhi dalam setiap transaksi akad yaitu:¹¹

¹⁰Sohari Sohrani, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 43.

- 1) Kedua orang akad yang melakukan akad harus cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- 4) Akad tidak dilarang oleh *syara'*.
- 5) Akad dapat memberikan *faedah*.
- 6) *Ijab* tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*.
Ijab qabul bersambung, jika berpisah sebelum adanya *qabul* maka batal.

3. Macam-Macam Akad

Para ulama mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi dari berbagai segi keabsahannya. Menurut *syara'* dapat dibagi menjadi:¹²

- a. Akad *shahih* yaitu akad yang memenuhi rukun syarat. Hukum dari rukun dan syarat ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad *shahih* ini menjadi dua macam, yaitu:

¹¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat* (Bogor: Ghalia Indonsia, 2011), h. 43.

¹²Nasron Harun, *Fiqh Muamalah*...., h. 108.

- 1) Akad *nafis* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *mauquf* yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.

Dilihat dari segi mengikat atau tidaknya, para ulama *fiqh* membagi menjadi dua macam:¹³

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad tersebut tanpa izin pihak lain.
 - 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad *wakalah*, *ariyah*, *wadiah*.
- b. Akad yang tidak *shahih* yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi dua macam yaitu akad yang *fasad* dan akad yang *batil*. Akad yang *batil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan dari *syara'*. Sedangkan akad *fasad* adalah akad pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas.¹⁴

¹³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h.72.

¹⁴*Ibid.*, h.73.

4. Berakhirnya Akad

Akad akan berakhir apabila:¹⁵

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika:
 - 1) Jual beli itu *fasad*, seperti ada unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya *khiyar* syarat, *khiyar aib* atau *khiyar rukyah*.
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 - 4) Tercapainya tujuan akad tersebut secara sempurna.
- d. Salah satu pihak akad meninggal dunia. Dalam hal ini para ulama *fiqh* menyatakan bahwa tidak semua kadang otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, di antaranya adalah akad sewa menyewa.

B. Upah

1. Pengertian upah

Secara etimologi *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwad'* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.¹⁶ Oleh

¹⁵Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah....*, h. 35.

karena itu *al-ijarah* mempunyai pengertian secara umum meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atas imbalan sesuatu kegiatan, atau upah melakukan sesuatu kegiatan.¹⁷ Sedangkan menurut *syara' ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹⁸ Upah juga sering disebut dengan *ijarah 'ala al-a'mal*, ialah sebagai suatu akad yang objeknya adalah melakukan suatu pekerjaan.¹⁹ Sayid Sabiq mengemukakan bahwa *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh* (sewa menyewa atau imbalan, ganjaran atau pahala). Jadi *ijarah* menurut bahasa dan secara *syara'* memiliki makna jual-beli manfaat.²⁰

Menurut Taqi Al-Din Al-Nabhani, *ijarah* adalah kepemilikan harta dari seorang yang dikontrak tenaganya (*ajir*) oleh orang yang mengontrak tenaganya (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari *musta'jir* oleh *ajir*, di mana *ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tetapi dengan disertai kompensasi (imbalan).²¹ Sedangkan menurut pernyataan profesor Benham *ujrah* adalah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.”²²

¹⁶Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 170.

¹⁷Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 29.

¹⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 318.

¹⁹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 55.

²⁰Eka Nuraini, Ab Mumin bin Ab Ghani, Akad Penerbitan Sukuk Di Pasar Modal Indonesia dalam Perspektif Fikih, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 14 No. 1, 2017.

²¹Idri, *Hadist Ekonomi (Ekonomi Dalam Pespektif Hadist Ekonomi)* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 231.

²²Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h. 31.

Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu dibayarkan menurut perjanjian.²³ Mengenai masalah pengupahan, Islam menetapkan suatu pembahasan dalam kitab *fiqh*, yang terdapat dalam *al-ijarah*. *Ijarah* merupakan suatu jenis akad antara dua pihak yang berkaitan dengan manfaat atau jasa dalam tempo yang telah disepakati berdasarkan ketentuan *syari'at*. Dalam konsep *ijarah* pemilik yang menyewakan suatu manfaat kepada orang lain disebut dengan *mu'jir*. Sedangkan pihak lain yang menyewa manfaat disebut *mus'tajir*, dan suatu yang diakad untuk diambil manfaatnya disebut dengan *ma'jur*, serta jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat *ajran* atau *ujrah*. Ketika akad *ijarah* telah terjadi secara sah, maka *musta'jir* sudah berhak atas manfaat, dan orang yang menyewakan sudah berhak atas upah sebagai pengganti manfaat yang disewakan karena *ijarah* termasuk jenis transaksi tukar menukar.

Adapun secara terminologi, beberapa ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam mengartikan *ijarah* di antaranya, menurut ulama Hanafiyah *ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta. Menurut Malikiyah, *ijarah* adalah kepemilikan manfaat suatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Menurut Syafi'iyah, *ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat

²³Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 141.

yang dituju mengandung maksud tertentu bersifat *mubah*, dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan (upah tertentu). Menurut Hambali, *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan *afal ijarah* dan semacamnya. Menurut Hasby Ash-Siddiqye bahwa *ijarah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.²⁴

Menurut pendapat ulama Malikiyah dan ulama Hanafiyah upah atau biaya sewa belum berstatus positif dan menjadi wajib hanya oleh sebab akad itu sendiri, akan tetapi upah atau biaya sewa menjadi positif dan wajib ketika pihak yang bersangkutan telah mendapat kemanfaatan yang dimaksud dengan secara nyata atau dengan menjadikannya bisa mendapatkan kemanfaatan tersebut. karena pada saat itulah, suatu yang menjadi objek akan menjadi milik *musta'jir* (pihak yang memperkerjakan).²⁵

Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan *muamalah* yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya boleh atau *mubah*, bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Bolehnya hukum *ijarah* berdasarkan kepada Ayat-Ayat Al-Qur'an dan dan Hadist Nabi.²⁶ Pada dasarnya *ijarah* adalah salah satu bentuk kegiatan antara para pihak yang

²⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafinndo Persada, 2003), h. 227.

²⁵Wahbah Zuhaily, *Fikih Islam 7 wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 86.

²⁶Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 216.

melakukan akad guna meringankan pekerjaan salah satu pihak, serta merupakan bentuk kegiatan sosial yang saling menolong antara sesama sesuai dengan ajaran agama.²⁷ Dalam pandangan syariat Islam upah adalah hak dari orang yang telah bekerja dan kewajiban orang yang mempekerjakannya untuk membayarnya. Upah adalah hak dari seorang buruh sebagai harga atas tenaga yang telah disumbangkannya dalam proses produksi dan pemberi kerja wajib membayarnya.²⁸ Dan tujuannya disyariatkan *ijarah* adalah untuk memberikan keringan kepada umat dalam pergaulan hidup.

Seorang mempunyai uang namun tidak dapat bekerja, dan pihak lain ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapat keuntungan.²⁹

2. Dasar Hukum

Dalam hukum Islam pengupahan termasuk ke dalam *ijarah al-'amal*. Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi mencari harta.³⁰ Dalam akad *ijarah*, hampir semua *fuqaha* sepakat bahwa *ijarah* dibolehkan berdasarkan Al-Quran, Hadist (sunnah), dan Ijma'. Adapun beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail Bin Ulayyah, Hasan Al-Basri, Al-Kasyani, An-Nahrawani, dan Ibnu Kaisan. Mereka tidak

²⁷Helmi Karim, *Fikih Muamalah*..., h. 30.

²⁸M. Harir Muzaki, Ahmad Sumanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klessem Pacitan, *Journal Al-Adalah*, Vol. 14, No. 2, 2017.

²⁹Amir Syarifudin. *Garis-Garis Fiqih*..., h. 217.

³⁰Ika Novi Nur Hidayati, Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Az Zarqa*, Vol. 9, No. 2, 2017.

membolehkan *ijarah*, sebab *ijarah* adalah jual beli kemanfaatan yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Suatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan suatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan.³¹

Ulama memperbolehkan *ijarah* berdasarkan legitimasi dari Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Ijma'.

a. Al-Qur'an

1) Firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah [2] : 233



Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Baqarah [2] : 233)³²

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini

³¹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 123.

³²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994), h. 8.

boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.³³

2) Firman Allah Swt. QS. Az-Zukhruf [43] : 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحَارًا ۖ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya; “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”(QS. Az-Zukhruf [43] : 32)³⁴

3) Firman Allah Swt. QS. Al-Qasash [28] : 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَأُ اسْتَغْرِجَهُ ۖ وَإِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu

³³Ahmad Mushtofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi, Cet. I* (Semarang: Toha Putra, 1984), h. 350.

³⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994), h. 798.

ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".(QS. Al-Qasash [28] : 26)³⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.³⁶

4) Firman Allah Swt QS. An-Nahl [16] : 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ



Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada

³⁵*Ibid.*, h. 613.

³⁶Ahmad Mushtofa Al-Marigi, *Tafsir Al-Maragi, Cet. I* (Semarang: Toha Putra, 1984), h.

mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”(QS. An-Nahl [16] : 97)³⁷

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja di suatu badan usaha (perusahaan dapat dikategorikan sebaga amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram). Dengan demikian, maka seorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat.³⁸

b. *Sunnah*

Selain ayat *Al-Qur'an* di atas, ada beberapa *hadist* yang menegaskan tentang upah, *hadist* Rasulullah Saw. sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (راوه ابن ماجه)³⁹

Artinya: “Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah Saw: berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah, shahih)⁴⁰

Hadist riwayat Ibnu Sa'id Al-Khudri, Nabi Saw. bersabda:

³⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang:Kumudasmoro Grafindo,1994), h. 417.

³⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta:Lentera Hati, 2002), h 361.

³⁹Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam* (Jakarta; Daruun Nasyir Al-Misyiriyyah), h. 18.

⁴⁰Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram, Cet I* (Jakarta: Pustaka Amani, 1195), h. 361.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَأُيسِّمَ لَهُ أَجْرَ تَهْ (رَأَوْهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ)⁴¹

Artinya: “Dari Abu Sa’id Al-Khudri ra. bahwasannya Nabi Saw. bersabda: “barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.” (HR. Abdurrazzaq)⁴²

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجْرًا حُجَامٍ فَقَالَ: اجْتَبَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ (رَأَوْهُ الْبُخَارِ
رِئِ)⁴³

Artinya; “Dari Annas ra. sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah dari bekerja membekam, dia mengatakan:” Rasulullah Saw. dibekam oleh Abu Thaibah dan beliau memberinya imbalan sebanyak dua sha’ makanan.”(HR. Bukhari)⁴⁴

c. *Ijma’*

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa *ijarah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan *ijma’* ini. Sebagai mana diungkapkan Sayyid Sabiq:” dan atas disyari’atkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan *ijma’* para ulama ini, karena *al-ijarah*

⁴¹Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam* (Jakarta; Daruun Nasyir Al-Misyiriyyah), h. 189.

⁴²Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram, Cet I* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 360.

⁴³Imam Bukhori, *Shahih Al-Bukhori, Jilid 4* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004), h. 407.

⁴⁴Achmad Sunarto Dkk, *Terjemah Shahih Bukhari, Jilid 7* (Semarang: As-Syifa, 1993), h. 483

merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁴⁵

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah Al-Mujtahid*, juga mengatakan bahwa “*sesungguhnya sewa menyewa itu dibolehkan oleh seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha masa pertama*”.⁴⁶ *Al-ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti kepemilikan atas barang itu sendiri.⁴⁷

3. Rukun dan Syarat

Pada dasarnya akad *ijarah* harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rukun merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam rukun tersebut. Rukun dan syarat tersebut harus terpenuhi sehingga transaksi tersebut dapat dikatakan sah menurut *syara'*. Adapun rukun dan syarat upah (*ijarah*) menurut Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul* dari kedua belah pihak yang bertransaksi.⁴⁸

⁴⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, Cet. I (Bandung: Al-Maarif, 1987), h. 18.

⁴⁶Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujathid Juz 2* (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga), h. 165.

⁴⁷Muhammad Syafi'i Antonia, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 117.

⁴⁸Abdul Rahman Al-Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 278.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 295 rukun *ijarah* di antaranya, terdapat *mu'jir* (pihak yang menyewa), *mu'ajir* (pihak yang menyewakan), *ma'jur* (benda yang disewakan), dan akad.⁴⁹

Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun *ijarah* terdiri dari 4 (empat) macam, di antaranya:

a. *Aqidain* (orang yang berakal)

Ada dua orang yang melakukan akad upah mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah atau orang yang menyewakan, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang membayar upah, untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. *Aqid* disyaratkan harus orang yang *baligh*, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikn harta), dan saling meridhoi.⁵⁰

b. *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)

Akad yang dilakukan antara *mu'jir* dan *musta'jir*. *Sighat* dalam transaksi *ijarah* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan suatu maksud, berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya.⁵¹

⁴⁹Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009), h. 87.

⁵⁰Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor; Ghalia Indah, 2011), h. 170.

⁵¹Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 316.

c. *Ujrah* (uang sewa atau upah)

Ujrah atau upah disyaratkan kepada kedua belah pihak untuk mengetahui besaran jumlahnya, baik dalam sewa menyewa maupun upah mengupah.⁵²

d. *Ma'qud alaih* (manfaat)

Manfaat yang dimaksud adalah kegunaan yang akan diperoleh baik berupa barang yang disewa atau jasa dari orang yang bekerja.⁵³

Masing-masing rukun yang membentuk suatu akad memerlukan syarat-syarat agar rukun tersebut dapat berfungsi membentuk terjadinya akad.⁵⁴ Dalam *ijarah* terdapat 4 (empat) jenis persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

1) Syarat *in'iqad* (syarat terjadinya akad)

Syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad adalah orang yang telah *baligh* dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hambali)⁵⁵ sehingga apabila orang tersebut tidak berakal, layaknya anak kecil atau orang gila, apabila menyewakan harta atau dirinya maka *ijarahnya* tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki yang mengatakan orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia *baligh*. Anak yang sudah

⁵²Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 118.

⁵³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 321.

⁵⁴Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 97.

⁵⁵Ahmad Wajdi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 321.

mumayyiz (minimal 7 tahun) diperbolehkan melakukan akad *ijarah* dengan syarat harus diketahui oleh walinya.⁵⁶

2) Syarat *nafadz* (syarat berlangsungnya akad)

Syarat berlangsungkan (*nafadz*) akad *ijarah* adalah terpenuhinya hak milik. Apabila *aqid* tidak memiliki hak kepemilikan seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa seizinnya), maka akad tersebut tidak bisa dilaksanakan. Menurut Hanafiah dan Malikiyah, jika terjadi hal seperti ini maka status akadnya bersifat *mauquf* (ditangguhkan) hingga memperoleh persetujuan dari pemilik barang. Hal ini berbeda pendapat dengan Syafi'iyah dan Hanabilah yang menganggap bahwa hukumnya batal, layaknya jual beli.⁵⁷

3) Syarat sahnya *ijarah*

Ada beberapa syarat sahnya *ijarah* yang harus dipenuhi yang berkaitan dengan pelaku (*aqid*), objek (*ma'qud alaih*), sewa atau upah (*ujrah*), serat akadnya itu sendiri. Syarat-syarat tersebut di antaranya:

- (a) Persetujuan dari kedua belah pihak yang berakad. Apabila salah satu dari pihak yang bertransaksi dalam keadaan terpaksa atau dipaksa maka transaksi dianggap tidak sah dan

⁵⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 231.

⁵⁷Ahmad Wajdi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 324.

batal.⁵⁸ Kedua belah pihak yang berakad harus saling meridhai atau rela dalam melakukan akad tersebut.

(b) Manfaat barang atau jasa yang disewakan harus diketahui secara jelas, agar tidak menimbulkan pertentangan di antara *aqid*. Untuk mengantisipasi adanya perselisihan bisa dilakukan dengan melihat barang secara langsung dan menyebutkan kriteria dan sifat secara detail dari objek akad. Selain itu, waktu penyewaan juga harus ditentukan dengan jelas. Jika manfaat yang akan diambil berupa jasa atau tenaga, maka jenis pekerjaan harus dijelaskan ketika transaksi dilakukan.⁵⁹

(c) Objek *ijarah* (*ma'qud alaihi*) harus dapat dipenuhi, baik *hakiki* maupun *syar'i*. oleh karena itu, dianggap tidak sah apabila menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara *hakiki*.⁶⁰

(d) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan oleh agama. Apabila kemanfaatannya tidak diperbolehkan oleh ketentuan agama maka dianggap tidak sah dan harus ditinggalkan.⁶¹

⁵⁸*Ibid.*, h. 322.

⁵⁹Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunah Sayyid Sabiq: Pengantar Syaikh Aidh Al-Qarni, Cet. I* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 804.

⁶⁰Ahmad Wajdi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 324.

⁶¹Chairun Pasaribu Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam, Cet. I* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 54-55.

(e) Manfaat *ma'qud 'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*, yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad, maka *ijarah* tidak sah.⁶²

(f) Imbalan atau upah berupa harta yang bernilai. Untuk mengetahui apakah termasuk harta yang bernilai atau tidak yaitu dengan cara melihat atau menyifatinya. Karena imbalan atau upah adalah harga untuk manfaat yang telah didapatkan, sementara harga disyaratkan harus diketahui secara jelas.⁶³

Adapun syarat yang berkaitan dengan upah di antaranya:⁶⁴

(a) Upah harus berupa *mal mutaqawwin* yang diketahui. Syarat ini diperlukan dalam *ijarah*, karena *ujrah* (upah) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli.

(b) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan manfaat *mauqud 'alaih*. Apabila upah atau sewa yang diberikan sama dengan jenis manfaat barang yang disewa maka *ijarah* tidak sah.

4) Syarat *luzum* (syarat mengikatnya akad *ijarah*)

Agar akad itu mengikat, maka disyaratkan dua hal, yakni benda-benda yang disewakan harus terhindar dari aib (cacat) yang dapat menyebabkan terhalangnya suatu manfaat. Jika

⁶² Ahmad Wajdi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 326.

⁶³ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunah Sayyid Sabiq: Pengantar Syaikh Aidh Al-Qarni, Cet. I* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 804.

⁶⁴ Ahmad Wajdi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 327.

ditemukan suatu aib yang demikian sifatnya, maka *musta'jir* memiliki hak *khiyar* (memilih untuk meneruskan dengan pengurangan uang sewa) atau menfasakhnya (membatalkannya).⁶⁵ Hak *fasakh* diberikan kepada penyewa jika cacatnya termasuk cacat yang dapat merusak pemanfaatan suatu barang.⁶⁶

Syarat *luzum* selanjutnya yaitu tidak terdapat *uzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*. Misalnya, apabila terdapat *uzur* di antara salah satu pihak yang melakukan akad baik *mu'jir* atau *musta'jir*, atau terdapat *uzur* di dalam *ma'qud alaih*. Maka menurut Hanafiah pelaku berhak untuk membatalkan akad. Sementara *jumhur* ulama berbeda pendapat selama tidak hilang objek akadnya (kemanfaatannya).⁶⁷

Uzur yang menyebabkan *fasakh* ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- (1) *Uzur* dari pihak penyewa, misalnya dalam mempekerjakan pekerja sering berubah dan tidak sesuai dengan profesi sehingga tidak menghasilkan sesuatu dan akhirnya pekerjaan menjadi sia-sia.
- (2) *Uzur* dari pihak yang menyewakan, misalnya yang menyewakan memiliki utang banyak dan tidak ada jalan

⁶⁵ Ahmad Wajdi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 327

⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5, Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 405.

⁶⁷ Ahmad Wajdi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 327

lain untuk melunasi kecuali dengan menjual barang yang disewakan.⁶⁸

(3) *Uzur* yang berkaitan dengan barang yang disewakan sesuatu yang disewa.

4. Macam-Macam Upah

Di dalam *fiqh muamalah* upah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Upah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan, seperti dalam shalat, puasa, haji dan membaca *Al-Qur'an*. Namun hal ini diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini. Pendapat Imam Hanafi bahwa menyewa seseorang untuk melakukan perbuatan shalat, puasa, haji dan membaca *Al-Qur'an* yang pahalanya dijadikan kepada orang tertentu, seperti arwah ibu atau bapak yang menyewa maka haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut.⁶⁹
- b. Upah dalam sewa tanah, dibolehkan menyewa tanah, dan disyaratkan menjelaskan barang yang disewakan, baik itu berbentuk tanaman atau tumbuhan. Jika yang dimaksudkan adalah untuk pertanian, maka harus dijelaskan, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang ia kehendaki, apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka *ijarah* dinyatakan *fasid* (tidak sah). Karena

⁶⁸Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 124.

⁶⁹Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), h. 226.

kegunaan tanah itu bermacam-macam, sesuai dengan tanaman seperti halnya juga memperlambat tumbuhnya yang ditanam di tanah.⁷⁰

- c. Upah menyusui anak, ada beberapa ulama yang pendapatnya berbeda-beda dalam upah menyusui anak di antaranya adalah As-Shahiban (murid Abu Hanifah) dan Ulama Syafi'iyah. Berdasarkan *qiyas* tidak boleh menyewa seorang perempuan untuk menyusui ditambah makanan dan pakaian karena ketidakjelasan upahnya.

5. Sistem Pengupahan Dalam Islam

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Menurut Abi Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mua'jir* menyerahkan zat benda yang disewakan kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya.⁷¹

⁷⁰Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 13, *Fiqh Sunnah Terjemah Kamaluddin A.Marzuki* (Bandung: Al-Maarif, 1988), h. 24.

⁷¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 121.

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat:⁷²

- a. Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan
- b. Mendapat manfaat. Jika *ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- c. Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- d. Mempercepat pembayaran *ijarah* sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- 1) Ketika pekerjaan telah selesai.
- 2) Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang disewakan mengalir selama penyewaan berlangsung.

Menurut Mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan menangguhkannya sah seperti juga halnya mempercepat yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau

⁷²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemah Kamaluddin A.Marzuki* (Bandung: Al-Maarif, 1988), h. 5.

menangguhkan, sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut.⁷³

6. Batalnya Akad

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang di tangannya rusak. Menurut ulama Syafi'iyah, jika *ajir* bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya apabila barang berada di tangannya, ia tidak mendapat upah.

Ulama Hanafiyah juga hampir senada dengan pendapat di atas hanya saja diuraikan lagi sebagai berikut.⁷⁴

a. Jika benda di tangan *ajir*

- 1) Jika ada bekas pekerjaan, *ajir* berhak mendapatkan upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.
- 2) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, *ajir* berhak mendapat upah atas pekerjaannya sampai akhir.

b. Jika benda berada di tangan penyewa, berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.

7. Berakhirnya Akad Upah

Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir apabila:⁷⁵

⁷³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemah Kamaluddin A.Marzuki* (Bandung: Al-Maarif, 1988), h. 26.

⁷⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, h.133-134.

⁷⁵Nasron Harun, *Fiqh Muamalah...*, h. 237

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahit hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan pada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.
- c. Menurut Mazhab Hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *al-ijarah* menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut *jumhur* ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Menurut Sayyid Sabiq⁷⁶, berakhirnya sewa menyewa dengan sebab-sebab sebagai berikut:
 - 1) Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
 - 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi *'ain*.
 - 3) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahit, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya barang.

⁷⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*....,h. 34.

- 4) Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat *uzur* yang mencegah *fasakh*. Seperti jika masa *ijarah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman di panen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksud untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.

C. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian atau kontrak bersal dari bahasa Inggris yaitu *contracts*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian). Menurut Kadir, suatu perjanjian adalah samata-mata untuk suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok di dalam dunia usaha dan menjadi dasar bagi kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan termasuk juga menyangkut tenaga kerja.⁷⁷

Secara etimologi perjanjian atau perikatan adalah ikatan. Sedangkan menurut terminologi perjanjian atau perikatan adalah suatu perbuatan

⁷⁷Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1980), h. 93.

di mana seseorang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang lain.⁷⁸

Dalam Islam, perjanjian (*aqad*) secara *harfiah* berarti ikatan atau peraturan yang dipergunakan dalam arti janji dan juga segala yang menunjukkan ikatan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu baik sesuai dengan hukum maupun tidak.⁷⁹ Perjanjian dipergunakan untuk mewujudkan hubungan yang sah antara pihak, perjanjian juga diartikan sebagai kesepakatan dua belah pihak yang mengharuskan masing-masing yang bersepakat untuk melaksanakan sesuatu ketetapan yang telah disepakati.⁸⁰

Kata akad dalam kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulam baik ikatan yang nampak (*hissyy*) maupun tidak nampak (*ma'nawy*).⁸¹ Kamus *Al-Mawrid* menerjemahkan *al-'aqd* sebagai *contract and agreement* atau kontrak dan perjanjian. Istilah yang sesuai dengan kata *aqd* yaitu '*ahdu* dalam Al-Qur'an mengacu kepada pernyataan seseorang tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, baik setuju ataupun tidak setuju, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut.

⁷⁸Titik Triwulan Titi, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 221.

⁷⁹Sri Sofwan Masjchoen, *Hukum Jaminan Indonesia*, h. 1.

⁸⁰Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Kad Dalam Fikih Muamalah)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 68.

⁸¹Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah." *Jurnal Fakultas Hukum Uii* 2, No. 1 (2008), h. 93.

2. Dasar Hukum Perjanjian

a. Surat Al-Maidah [5] : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.” (QS. Al-Maidah [5] : 1)⁸²

b. Surat Al-Imraan [3] : 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya; “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”(QS. Al-Imraan [3] : 76)⁸³

c. Dalam kaidah *fiqh* dikemukakan yaitu:

“Hukum asal dalam segala hal adalah boleh sehingga ada dalil yang membatalkannya atau mengharamkannya.”

Menurut Ibnu Abbas, Mujahid dan yang lainnya Firma Allah

“penuhilah akad-akad itu”, berarti janji-janji ialah perkara yang dihalalkan Allah Swt. diharamkan Allah Swt. difardhukan dan ditetapkan Allah Swt. di dalam Al-Qur’an, maka janganlah kamu menyiasati dan melanggarnya.⁸⁴

Menyempurnakan perniagaan dapat dilakukan dengan adanya unsur keterbukaan, kejelasan, dan keadilan, serta kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan sebuah perniagaan maupun transaksi. Keberadaan perjanjian menjadi sebuah kewajiban untuk

⁸²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*..., h. 156.

⁸³*Ibid.*, h. 88.

⁸⁴Muhammad Nasib Ar-Rifai, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Gema Insani, 2011),

menegaskan sebuah transaksi yang sah. Unsur kerelaan menjadi penting diperhatikan, sebab manakala terdapat unsur keterpaksaan dalam sebuah perjanjian akan mencederai transaksi tersebut.

3. Rukun dan Syarat Perjanjian

a. Rukun

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk perjanjian itu ada 4 (empat), yaitu:⁸⁵

- 1) *Al-aqidan* adalah para pihak yang membuat perjanjian yaitu dua orang atau lebih. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan perjanjian sehingga perjanjian tersebut dianggap sah. Kelayakan yaitu: pertama, bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kedua, bebas memilih. Tidak sah perjanjian yang dilakukan orang di bawah paksaan, kalau paksaan itu terbukti. Ketiga, perjanjian itu dapat dianggap berlaku bila tidak memiliki pengadaian yang disebut *khiyar* (hak pilih).
- 2) *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diadakan, seperti benda-benda yang dijual dalam perjanjian jual beli, dalam perjanjian *hibah* (pemberian), dalam perjanjian gadai, hutang yang dijamin seseorang dalam perjanjian *kafalah*.
- 3) *Maudhu' al-aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan perjanjian.⁸⁶

⁸⁵Mardani, *Hukum Perikatan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 54.

- 4) *Shigat al-aqd* ialah *ijab* dan *qabul*. *Ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang melakukan perjanjian sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan perjanjian, sedangkan *qabul* adalah perkataan yang keluar dari pihak yang melakukan perjanjian pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, ada beberapa hal seseorang terhalang untuk melakukan perbuatan hukum (melakukan kontrak syariah)⁸⁷, di antaranya yaitu:

- a) Gila, bila seseorang dalam keadaan gila atau tidak waras maka akad tersebut tidak sah.
- b) Rusak akal, dalam suatu pelaksanaan akad seseorang harus dalam keadaan yang waras, pengertian rusak akal bisa disamakan dengan pengertian gila.
- c) Mabuk, seseorang yang sedang mabuk tidak boleh melakukan perbuatan hukum atau melakukan kontrak dikarenakan orang tersebut dalam keadaan pengaruh alkohol yang memabukan.
- d) Tidur, dalam melakukan perikatan seseorang harus sadar ataupun sehat sepenuhnya, bila orang itu dalam keadaan tidur, maka batal akad kontraknya tersebut.

⁸⁶Trisadin P. Usanti, Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 48.

⁸⁷Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Pers, 2009), h. 32.

Adapun mengenai rukun akad, ulama *fiqh* memiliki perbedaan pendapat dalam menentukannya. Menurut Hendi Suhendi,⁸⁸ rukun akad yaitu sebagai berikut:

- a) *Aqid* adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
- b) *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan .
- c) *Maudhu' al-'aqd*

b. Syarat sah perjanjian

Menurut pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian itu harus sah terpenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

- 1) Adanya kata sepakat.
- 2) Kecakapan untuk membuat perjanjian.
- 3) Adanya suatu hal tertentu.
- 4) Adanya sebab (*causa*) yang halal.

Syarat yang pertama dan kedua adalah syarat yang harus dipenuhi oleh subjek suatu perjanjian, oleh karena itu disebut sebagai syarat subjektif. Syarat ketiga dan keempat adalah syarat yang harus dipenuhi oleh objek perjanjian, oleh karena itu disebut dengan syarat objektif. Adapun penjelasan dari masing-masing sebagai berikut:

- 1) Kata sepakat

⁸⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), h. 47

Kata sepakat berarti persesuaian kehendak, maksudnya memberikan persetujuan atas kesepakatan. Jadi sepakat merupakan pertemuan dua kehendak di mana kehendak pihak yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain dan kehendak tersebut saling bertemu.

Menurut Subekti, yang dimaksud dengan kata sepakat adalah persesuaian kehendak antara dua pihak yaitu apa yang dikehendaki oleh pihak ke satu juga dikehendaki oleh pihak lain dan kedua kehendak tersebut menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.⁸⁹

2) Kecakapan bertindak untuk membuat perjanjian

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan perbuatan hukum.⁹⁰ Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagai mana ditentukan undang-undang. Orang yang cakap/mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum menurut ketentuan KUHPdata adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah menikah.⁹¹

⁸⁹Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1992), h. 4.

⁹⁰Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominate di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 24.

⁹¹Ratna Arta Windari, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 17.

3) Adanya objek atau hal tertentu

Bahwa yang menjadi objek dari perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi bisa berupa kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.⁹²

4. Asas-Asas Perjanjian

a. Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam dan merupakan prinsip dasar pula dari hukum perjanjian.⁹³ Pihak-pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi materi atau isi yang diperjanjikan, menentukan pelaksanaan dan persyaratan lainnya, melakukan perjanjian dengan siapapun, maupun bentuk perjanjian termasuk menetapkan cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan membuat perjanjian ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan *syari'ah* Islam.⁹⁴

b. Persamaan atau kesetaraan (*al-musawah*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara

⁹²J. Satrio, *Hukum Jaminan : Hak-Hak Jaminan Kebendaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 28.

⁹³Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Prena Damedia Group, 2004), h. 3.

⁹⁴Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus* (Jakarta: Prena Damedia Group, 2004), h. 3

satu dan yang lainnya karena setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perjanjian. Pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan, tidak boleh suatu kelaziman yang dilakukan dalam perjanjian ini.

c. Keadilan (*al-'adalah*)

Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan dan Al-Qur'an menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral. Pelaksanaan asas ini dalam perjanjian, di mana para pihak yang melakukan perjanjian dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajiban. Menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral maupun materil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan lainnya yang berlandaskan pada *syari'ah* Islam.⁹⁵ Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia yang disebut juga kedzaliman. Beberapa hal yang termasuk kedzaliman, antara lain adalah riba, timbangan yang tidak adil, penagguhan, pembayaran, hutang bagi yang mampu, dan lain-lain.

⁹⁵Yusuf Al-Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Cet. I (Jakarta: Robani Press, 1977), h. 396.

d. Kerelaan atau konsesnsualisme (*al-ridhaiyyah*)

Dasar asas ini adalah kalimat antara *dhin minkum* (saling rela di antara kalian). Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Bentuk kerelaan dari para pihak tersebut telah wujud pada saat terjadinya kata sepakat tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Kerelaan antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian dianggap sebagai syarat bagi terwujudnya semua transaksi.

e. Kejujuran dan kebenaran (*ash-shidq*)

Kejujuran adalah satu nilai etika yang mendasar dalam Islam. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu, dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas-asas ini tidak dijalankan, maka akan merusak pada legalitas perjanjian yang dibuat.

f. Kemanfaatan (*al-manfaat*)

Asas manfaat maksudnya adalah bahwa perjanjian yang dilakukan oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*). Islam mengharamkan perjanjian yang berkaitan dengan hal-hal yang

bersifat *mudharat* atau *mufsadat*, seperti yang tidak bermanfaat apalagi yang membahayakan.

g. Tertulis (*al-kitabah*)

Asas ini mengisyaratkan agar perjanjian yang dilakukan benar-benar dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan perjanjian, sehingga perjanjian itu harus dibuat secara tertulis (*kitabah*). Asas *kitabah* ini terutama dianjurkan untuk transaksi dalam bentuk tidak tunai (kredit). Di samping itu juga diperlukan adanya saksi-saksi *syahadah*, *rahn*, dan prinsip tanggung jawab individu.

5. Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam perjanjian gadai, perjanjian dipandang telah berakhir apabila hutang telah dibayar.⁹⁶ Selain telah tercapai tujuannya, perjanjian dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhirnya waktu.⁹⁷ *Fasakh* terjadi dalam sebab-sebab sebagai berikut:⁹⁸

- a. *Difasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti yang disebutkan dalam perjanjian rusak.
- b. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar* rukyat, cacat, syarat, atau majelis.

⁹⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 99.

⁹⁷*Ibid.*, h. 100.

⁹⁸Fahturahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2103), h. 59.

- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas perjanjian yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*.
- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya perjanjian tidak dipenuhi oleh pihak bersangkutan.
- e. Karena habis waktunya, lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu, apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batalah perjanjian yang telah diadakan oleh para pihak.⁹⁹

D. Tinjauan Pustaka

1. Dian Intan Khunnisa (2019) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Upah Dalam Jasa Salon Pada Salon Mawar Antasari, Kedamaian, Bandar Lampung”. Penelitian ini merupakan penelitian mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi *muamalah*. Penelitian ini menarik pada beberapa permasalahan, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap upah pekerja pada salon tersebut. Penetapan upah jasa yang didasarkan pada perhitungan kedua belah pihak dengan tidak mendasarkan kebutuhan hidup dan pembayarannya dilakukan setelah pekerjaan selesai. Sehingga antara pihak penyedia jasa dengan

⁹⁹Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika: 2004), h. 4.

penerima jasa sama-sama sepakat dengan segala ketentuan yang dibuat. Namun, pemilik salon mengubah secara sepihak dan mengurangi atau memotong upah kerjanya dalam pengupahan jasa kepada pekerja salon yang tidak berdasarkan kesepakatan kontrak kerja.¹⁰⁰

2. Nurul Mukharomah (2017) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah”. Penelitian ini merupakan penelitian mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi *muamalah*. Penelitian ini menarik pada beberapa permasalahan, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembayaran upah di awal akad. Pada kasus ini akad dilakukan oleh 2 pihak di mana pihak pertama sebagai orang yang memberikan upah (*mua'jir*) dan pihak kedua (*musta'jir*) sebagai penerima upah, dalam hal ini *mua'jir* menawarkan pekerjaan kepada *musta'jir* namun *musta'jir* meminta upah atas pekerjaan yang belum dikerjakan. Tentunya hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak karena pekerjaan yang dilakukan

¹⁰⁰Dian Intan Khunnisa, “Tinjauan Hukum Islam tentang Akad Upah dalam Jasa Salon pada Salon Mawar Antasari, Kedamaian, Bandar Lampung”(Skripsi Program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h. 79.

oleh *musta'jir* terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan *mu'jir*.¹⁰¹

3. Umi Kholifatul Mahmudah (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak di Desa Pilang Kecamatan Randu Blatung Kabupaten Blora”. Penelitian ini merupakan penelitian mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo, dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi *muamalah*. Penelitian ini menarik pada beberapa permasalahan, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan upah pekerja setelah melakukan pengairan sawah dengan menggunakan sistem piyak. Dalam pengupahan, satu lahan sawah dibagi menjadi 4 hingga 5 piyak dengan satu piyak sebagai upah pembayaran. Tidak diketahui secara pasti besaran upah yang diterima satu piyak tersebut karena upah diterima pihak jasa pengairan berupa gabah yang berbeda ukuran dan kualitasnya. Ketidak pastian ukuran jumlah dan kualitas gabah yang menyebabkan besaran upah yang diterima tidak jelas.¹⁰²

Dari beberapa karya ilmiah yang ada, setelah dimengamati, kajian secara spesifik dan komprehensif terdapat persamaan dan perbedaan.

¹⁰¹Nurul Mukharomah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah”(Skripsi Program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h. 64.

¹⁰²Umi Kholifatul Mahmudah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora”(Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), h. 71.

Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas masalah upah sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada objek permasalahan yang akan dibahas.

Oleh karena itu, mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Profesi Wanita Penyusun Bola *Billiard* Berdasarkan Pada Koin (Studi di Hendri Billiard Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan) belum ada yang mengkajinya, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009).

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002).

Al-Asqalani Al-Hafidh Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram, Cet I*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995).

Al-Asqalani Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam* (Jakarta; Daruun Nasyir Al-Misyiriyyah).

Al-Faifi Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fiqh Sunah Sayyid Sabiq: Pengantar Syaikh Aidh Al-Qarni, Cet. I*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013).

Al-Ghazaly Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Al-Maragi Ahmad Mushtofa, *Tafsir Al-Maragi, Cet. I*, (Semarang: Toha Putra, 1984).

Al-Qardhawi Yusuf, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Cet. I , (Jakarta: Robani Press, 1977).

Amirullah Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).

Antonia Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).

Anwar Dessy dan Amelia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: I, 2002).

Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010).

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).

Ar-Rifai Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Ash-Shawi Shalah dan Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008).

Ashshof Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5*, Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Basyir Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Pers, 2009).

Bukhori Imam dan Shahih Al-Bukhori, *Jilid 4*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011).

Djamil Fahturahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2103).

Erlangga, *Citizen Brand* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2003).

Harun Nasron, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada Pratama, 2007).

Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Idri, *Hadist Ekonomi Dalam Pespektif Hadist Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2015).

Ja'far Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung Jl Letkol H. Endro Suratmin (Sukarame: 2015).

Ja'far Khumedi, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016).

Karim Helmi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Reseach*, (Bandung: Social Mandar Maju, 1996).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009).

Maleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).

Manan Muhammad Abdul, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).

Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1980)

Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

Nawawi Ismail, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010).

Nurachmad, *Pedoman Mengurus Surat Izin dan Dokumen Secara Legal* (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2013).

Pasaribu Chairuman Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika: 2004).

Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

Ruf'ah Sohari, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Raja Grafindo Persada, 1979).

Rusyd Ibnu, *Bidayah Al-Mujathid Juz 2*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 2020).

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah 13*, Cet. I, (Bandung: Al-Maarif, 1987).

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah 13, Fiqh Sunnah Terjemah Kamaluddin A.Marzuki*, (Bandung: Al-Maarif, 1988).

Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominate di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).

Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Prena Damedia Group, 2004).

Satrio J, *Hukum Jaminan : Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).

Sedarmayanti Dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2001).

Shalahin Buvana, *Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016).

Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta:Lentera Hati, 2002).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018).

Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Prena Damedia Group, 2004).

Sunarto Achmad dkk, *Terjemah Shahih Bukhari, Jilid 7*, (Semarang: As-Syifa, 1993).

Syamsu Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teosi Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Kad Dalam Fikih Muamalah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Syarifudin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010).

Usanti Trisadin P. Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Zuhaily Wahbah, *Fikih Islam 7 wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Jurnal

Eka Nuraini, Ab Mumin bin Ab Ghani, Akad Penerbitan Sukuk Di Pasar Modal Indonesia dalam Perspektif Fikih, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 14 No. 1, (2017).

Ika Novi Nur Hidayati, Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Az Zarqa*, Vol. 9, No. 2, (2017).

Yulianti, “Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah.” *Jurnal Fakultas Hukum Uii* 2, No. 1, (2008).

Internet

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan” (On-line), tersedia di: kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Profesi (2016).

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan” (On-line), tersedia di: kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Bilyar (2016).

Skripsi

Dian Intan Khunnisa, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Akad Upah dalam Jasa Salon pada Salon Mawar Antasari, Kedamaian, Bandar Lampung*”, *Skripsi Program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2019.

Nurul Mukharomah, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah*”, Skripsi Program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Umi Kholifatul Mahmudah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora*”, Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.

Hasil Wawancara

Ahmad Chandra (Pemain *Billiard*), Wawancara dengan Penulis, Hendri *Billiard* Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, Tanggal 5 Mei 2020.

Bagas Setiawan (Pemain *Billiard*), Wawancara dengan Penulis, Hendri *Billiard* Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, Tanggal 5 Mei 2020.

Dewi (Marki), Wawancara dengan Penulis, di Hendri *Billiard* Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, Tanggal 10 Mei 2020.

Dian (Marki), Wawancara dengan Penulis, di Hendri *Billiard* Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, Tanggal 10 Mei 2020.

Hendriyansah (Pemilik *Billiard*), Wawancara dengan Penulis, Hendri *Billiard* Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, Tanggal 5 Mei 2020.

Iyan saputra (Pemain *Billiard*), Wawancara dengan Penulis, Hendri *Billiard* Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, Tanggal 5 Mei 2020.

Lina (Marki), Wawancara dengan Penulis, di Hendri *Billiard* Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, Tanggal 10 Mei 2020.

Maya (Marki), Wawancara dengan Penulis, di Hendri *Billiard* Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, Tanggal 10 Mei 2020.

Muhammad Aziz (Pemain *Billiard*), Wawancara dengan Penulis, Hendri *Billiard* Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, Tanggal 5 Mei 2020.

Oki Indrawan (Pemain *Billiard*), Wawancara dengan Penulis, Hendri *Billiard* Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, Tanggal 5 Mei 2020.

Rahmat Adi (Pemain *Billiard*), Wawancara dengan Penulis, Hendri *Billiard* Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, Tanggal 5 Mei 2020.

Saputro Jaya (Pemain *Billiard*), Wawancara dengan Penulis, Hendri *Billiard* Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, Tanggal 5 Mei 2020.

Vivian (Marki), Wawancara dengan Penulis, di Hendri *Billiard* Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, Tanggal 10 Mei 2020.

Yusuf Adi (Pemain *Billiard*), Wawancara dengan Penulis, Hendri *Billiard* Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, Tanggal 5 Mei 2020.